



SUMMARY EXECUTIVE

LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

Pertanggungjawaban Kegiatan Tahun 2024

Sekapur Sirih



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua

Adil Katalino, Bacuramin Ka'Saruga, Basengat Ka'Jubata.
(Baik pada sesama manusia, berpandangan hidup seperti perkataan baik di surga, kehidupan manusia bergantung kepada Tuhan Yang Maha Esa).

Dalam rangka memberikan pelayanan hukum dan pelayanan publik yang terbaik bagi para pencari keadilan dan masyarakat luas, Pengadilan Tinggi Palangkaraya melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kinerja tahun 2024 yang terukur serta telah dilakukan monitoring dan evaluasi. Hal ini sebagaimana amanat Pasal 4 ayat (2) Undang undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Fokus utama Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam memberikan pelayanan hukum dan pelayanan publik adalah kepuasan para pencari keadilan (*satisfaction of justice seekers*) yang akan berujung pada meningkatnya kepercayaan masyarakat (*public trust*) kepada Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah.

Dalam upaya meraih kepercayaan masyarakat (*public trust*) tentunya harus diiringi dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang baik (*good governance*), sehingga Pengadilan Tinggi Palangkaraya menyusun *Summary Executive* Laporan Tahunan Pertanggungjawaban Kegiatan Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah.

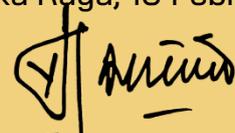
Summary Executive Laporan Tahunan Pertanggungjawaban Kegiatan Tahun 2024 ini berisi pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah berikut berbagai capaian prestasi dan penghargaan yang berhasil diraih. Perolehan capaian ini adalah salah satu alat evaluasi dan refleksi dalam penyempurnaan rencana kinerja Tahun 2025 yang diharapkan berujung pada penguatan integritas, penguatan akuntabilitas dan peningkatan pelayanan publik serta membangun kepercayaan publik terhadap lembaga dan aparatur pengadilan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian *Summary Executive* Laporan Tahunan Pertanggungjawaban Kegiatan Tahun 2024 ini disusun, selaku pimpinan saya mengucapkan terima kasih serta apresiasi dan penghargaan atas segala dedikasi dan partisipasi aktif, baik pikiran, tenaga, dan materi seluruh warga pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan segenap pihak yang telah memberikan kontribusi terbaik bagi pencari keadilan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penguatan integritas, akuntabilitas dan peningkatan kualitas kinerja Pengadilan Tinggi Palangkaraya, dalam upaya mewujudkan peradilan yang Agung, bermartabat dan Modern berbasis Teknologi Informasi guna mewujudkan Tata Kelola Pengadilan yang Transparan dan Akuntabel.

**“ Jadikan Integritas sebagai kompas,
Rajut kerjasama sebagai mesin penggerak,
Wujudkan prestasi yang dilandasi Integritas di Tahun 2025,
Bersama Kita Bisa. ”**

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Palangka Raya, 10 Februari 2025



Diah Sulastri Dewi

TENTANG PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Dalam Undang-Undang disebutkan bahwa wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya meliputi Provinsi Kalimantan Tengah dan memiliki 6 (enam) Pengadilan Negeri.

Bersamaan dengan adanya pemekaran wilayah pada tanggal 12 Desember 2006 dibentuklah Pengadilan Negeri Tamiang Layang berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006. Kemudian pada tanggal 26 Januari 2008 dibentuk Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008. Selanjutnya pada tanggal 26 April 2016 dibentuk Pengadilan Negeri Kuala Kurun, Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan Pengadilan Negeri Pulang Pisau berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016.

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya saat ini meliputi 1 (satu) Kota dan 13 (tiga belas) Kabupaten serta terbagi kedalam 11 (sebelas) Satuan Kerja Tingkat Pertama, sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Palangkaraya Kelas IA
2. Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB
3. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB
4. Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II
5. Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II
6. Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
7. Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kelas II
8. Pengadilan Negeri Kasongan Kelas II
9. Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II
10. Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II
11. Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II

VISI

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Palangkaraya Yang Agung”

MISI

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Palangkaraya
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Palangkaraya
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Tinggi Palangkaraya

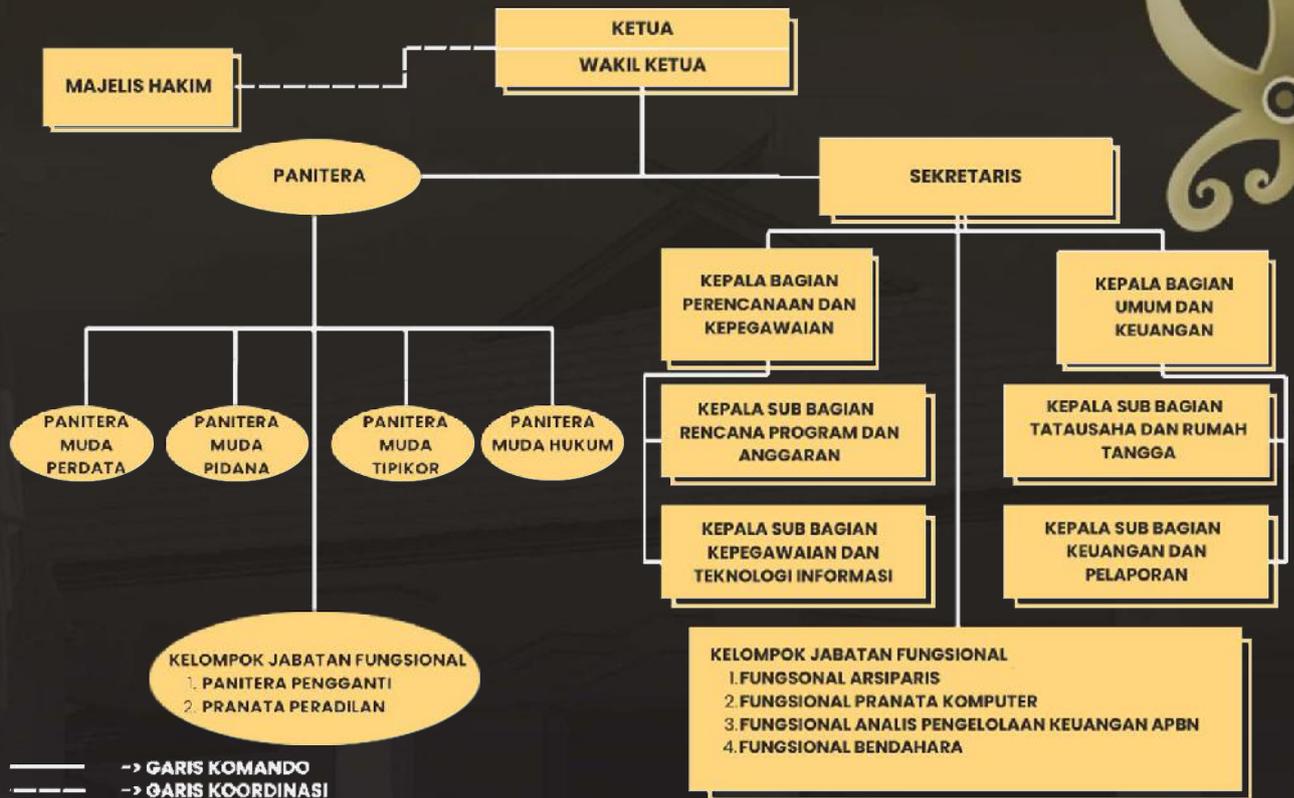
KEDUDUKAN

Sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang membawahi 11 (sebelas) Pengadilan Negeri di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

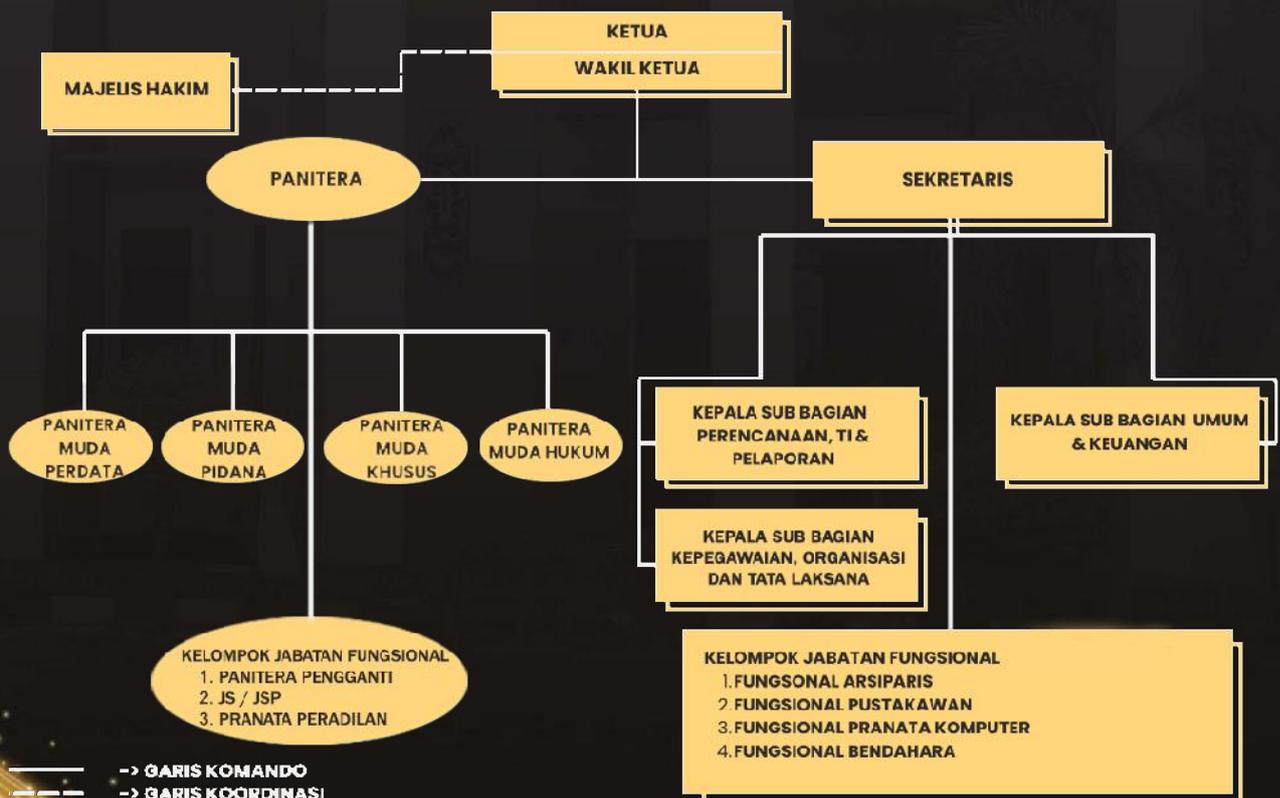
MOTTO

- C : Cerdas melaksanakan tugas
- A : Adil dalam berperilaku
- N : Nyaman dalam bekerja
- T : Tangkas dalam melayani
- I : Independen dari segala pengaruh
- K : Komitmen dalam penegakan hukum

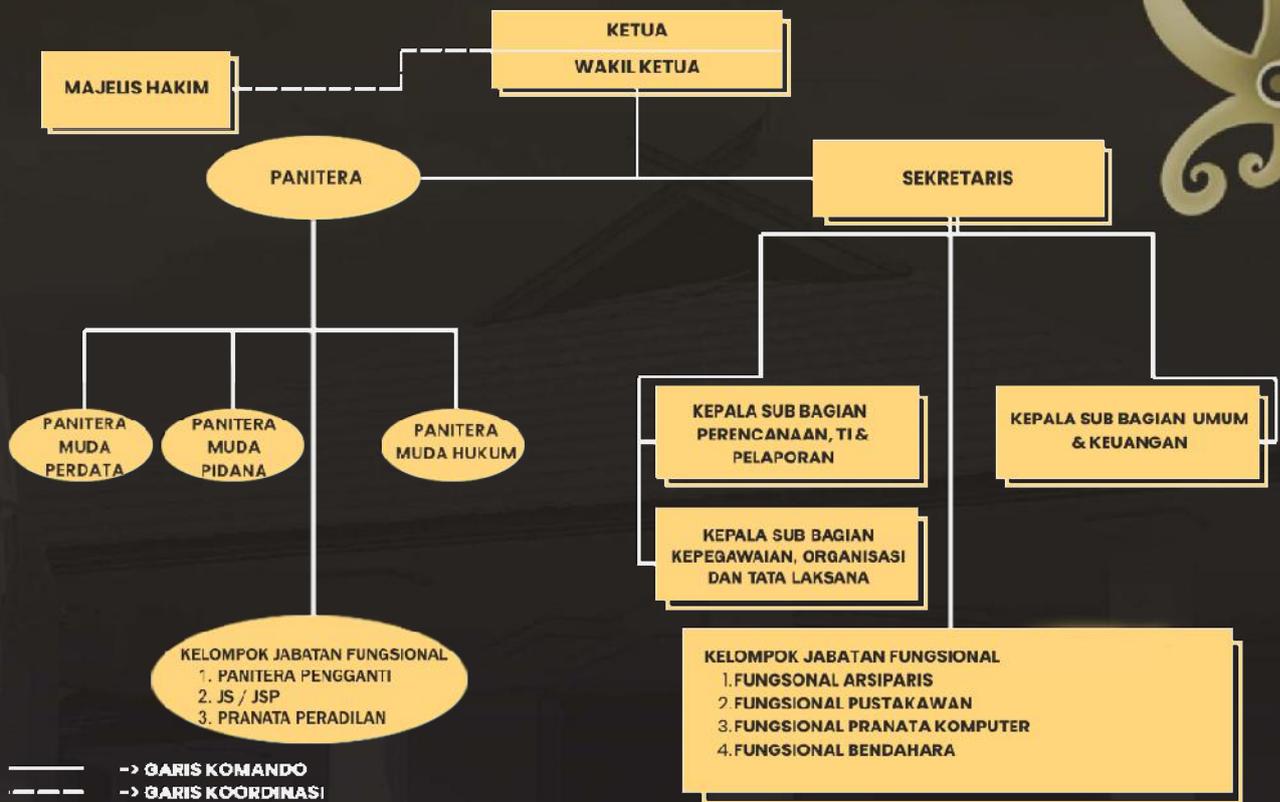
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA



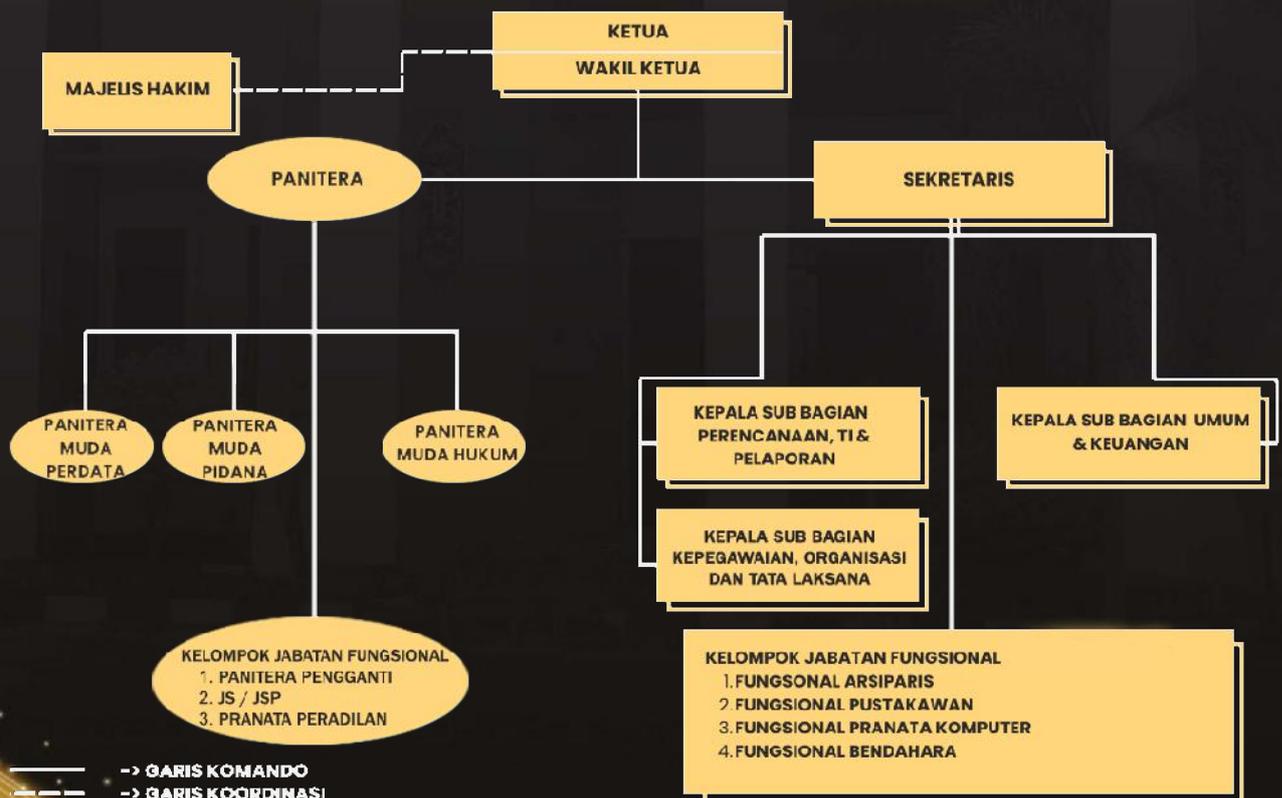
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADA WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI KELAS IB PADA WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI KELAS II PADA WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA



PROFIL PIMPINAN



KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

NAMA : Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H.

NIP : 196104021982032003

TTL : Medan, 02 April 1961

PANGKAT : Pembina Utama - (IV/e)

PENDIDIKAN : S3/Doktor Ilmu Hukum Univ. Jayabaya

RIWAYAT JABATAN

1	2024 - Sekarang	Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya
2	2023 - 2024	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung
3	2022 - 2023	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau
4	2022 - 2022	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang
5	2021 - 2022	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta
6	2017 - 2021	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
7	2016 - 2017	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung
8	2015 - 2016	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung
9	2014 - 2015	Ketua Pengadilan Negeri Cibinong
10	2013 - 2014	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong
11	2011 - 2013	Ketua Pengadilan Negeri Stabat
12	2010 - 2011	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat
13	2009 - 2010	Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat
14	2004 - 2009	Hakim Pengadilan Negeri Bandung
15	2000 - 2004	Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung
16	1996 - 2000	Hakim Pengadilan Negeri Sumber
17	1993 - 1996	Cakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
18	1983 - 1993	PNS/Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan
19	1982 - 1983	CPNS Pengadilan Tinggi Medan

PROFIL PIMPINAN



WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

NAMA : Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H.

NIP : 196107171988031002

TTL : Simalungun, 17 Juli 1961

PANGKAT : Pembina Utama - (IV/e)

PENDIDIKAN : S3/Doktor Ilmu Hukum Univ. Jayabaya

RIWAYAT JABATAN

1	2023 - 16 Januari 2025	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya
2	2022 - 2023	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon
3	2022 - 2022	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta
4	2019 - 2022	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar
5	2018 - 2019	Hakim Yustisial Ditjen Badilum
6	2017 - 2018	Ketua Pengadilan Negeri Medan
7	2016 - 2017	Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru
8	2014 - 2016	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan
9	2014 - 2014	Ketua Pengadilan Negeri Karawang
10	2013 - 2014	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bogor
11	2011 - 2013	Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
12	2006 - 2011	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas
13	2001 - 2006	Hakim Pengadilan Negeri Cibinong
14	1997 - 2001	Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
15	1992 - 1997	Hakim Pengadilan Negeri Curup
16	1989 - 1992	PNS / Cakim Pengadilan Negeri Bekasi
17	1988 - 1989	CPNS Pengadilan Negeri Bekasi

PROFIL HAKIM TINGGI



DIDIK WURYANTO, S.H., M.Hum.



SIGIT SUTRIONO, S.H., M.Hum.



BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum.



HERU BUDYANTO, S.H., M.H.



ABDUL WAHIB, S.H., M.H.



SARI SUDARMI, S.H.

PROFIL HAKIM TINGGI



MASKUR, S.H.



SUSWANTI, S.H., M.Hum



SUNDARI, S.H., M.H.



ANRY WIDYO LAKSONO, S.H., M.H.



ESTHER MEGARIA SITORUS, S.H., M.Hum.



NINIK HENDRAS SUSIOWATI, S.H., M.H.

PROFIL HAKIM AD HOC



AGUNG ISWANTO, S.H., M.H.



ERRY THERESIA, S.H., M.H.



Dr. LILY SOLICHUL MUKMINAH, S.H., M.H.



PIMPINAN, HAKIM TINGGI & HAKIM AD HOC PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA



AGUNG ISWANTO | HERU BUDYANTO | DIDIK WURYANTO | SIGIT SUTRIONO | ESTHER MEGARIA SITORUS | NINIK HENDRAS SUSILOWATI | LILY SOLICHUL MUKMINAH | SUSWANTI |
DIAH SULASTRI DEWI | MARSUDIN NAINGGOLAN | SARI SUDARMI | SUNDARI | ERRY THERESIA | ANRY WIDYO LAKSONO | MASKUR | ABDUL WAHIB | BONNY SANGGAH

PROFIL PANITERA



PANITERA PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

NAMA : Hasan Udi, S.H., M.H.

NIP : 196601061995031002

TTL : Demak, 6 Januari 1966

PANGKAT : Pembina Tingkat I - (IV/b)

PENDIDIKAN : S2/Universitas Muria Kudus

RIWAYAT JABATAN

1	2024 - Sekarang	Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya
2	2021 - 2024	Panitera Pengadilan Negeri Pati
3	2018 - 2021	Panitera Pengadilan Negeri Kudus
4	2017 - 2018	Panitera Pengadilan Negeri Praya
5	2014 - 2017	Wakil Panitera Pengadilan Negeri Rembang
6	2009 - 2014	Wakil Panitera Pengadilan Negeri Demak
7	2006 - 2009	Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Demak
8	1999 - 2006	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Demak
9	1996 - 1999	Pelaksana Pengadilan Negeri Demak
10	1995 - 1996	CPNS Pengadilan Negeri Demak

PROFIL SEKRETARIS



SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

NAMA : Meidyawati, S.E., M.E.

NIP : 197205142006042001

TTL : Surabaya, 14 Mei 1972

PANGKAT : Pembina Tingkat I - (IV/b)

PENDIDIKAN : S2 IAIN Palangka Raya

RIWAYAT JABATAN

1	2020 - Sekarang	Sekretaris Pengadilan Tinggi Palangkaraya
2	2015 - 2020	Sekretaris Pengadilan Negeri Sampit
3	2010 - 2015	Kasubbag Keuangan Pengadilan Tinggi Palangkaraya
4	2009 - 2010	Pelaksana Pengadilan Tinggi Palangkaraya
5	2007 - 2009	Pelaksana Pengadilan Negeri Sampit
6	2006 - 2007	CPNS Pengadilan Negeri Sampit



PIMPINAN & PEJABAT STRUKTURAL PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA



AHMAD GAZALI | BAMBANG SUKINO | SAMSUL RIZAL | LINDA | RUSPELIATI | HASAN UDI | DIAH SULASTRI DEWI | MARSUDIN NAINGGOLAN | MEIDYAWATI |
FAISAL SRU BRAMANTYO | ISTI YANI | FITRIYA NOR AINI | MUHAMMAD RUSGIANSYAH | WAHYU TEGUH



KELUARGA BESAR PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA





PERISTIWA PENTING PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA



RAPAT KOORDINASI PENEGAK HUKUM DAN PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS

Palangka Raya, 08 Januari 2024 | Pengadilan Tinggi Palangkaraya menggelar acara Rapat Koordinasi Penegak Hukum dan Penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2024.

PENANDATANGANAN KOMITMEN BERSAMA

Palangka Raya, 30 Januari 2024 | Pengadilan Tinggi Palangkaraya menyelenggarakan Penandatanganan Komitmen Bersama yang diikuti Hakim Tinggi dan Hakim Ad-Hoc, Pejabat Struktural/ Fungsional dan seluruh ASN serta PPNPN.



PENYAMPAIAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023

Palangka Raya, 31 Januari 2024 | Pengadilan Tinggi Palangkaraya menggelar Kegiatan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) Tahun 2023.

KPT PALANGKARAYA HADIRI LAPTAH MAHKAMAH AGUNG RI

Jakarta, 20 Februari 2024 | Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2023.





PELANTIKAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAMPIT

Palangka Raya, 22 Maret 2024 | Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya mengambil sumpah jabatan dan melantik Ketua Pengadilan Negeri Sampit.

KPT CUP TAHUN 2024

Palangka Raya, 28 Juni 2024 | Pengadilan Tinggi Palangkaraya mengadakan Turnamen Tenis KPT CUP Tahun 2024.



KUNJUNGAN KERJA DPR RI

Pangkalan Bun, 15 Juli 2024 | Pengadilan Tinggi Palangkaraya menerima Komisi III DPR RI dalam rangka Kunjungan Kerja Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024.

UPACARA PENGHORMATAN TERAKHIR ALMARHUM BAPAK H. AJIDINNOR, S.H., M.H.

Banjarmasin, 21 Juli 2024 | Pengadilan Tinggi Palangkaraya melaksanakan Upacara Penghormatan Terakhir Almarhum Bapak H. Ajidinnor, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya).





PELANTIKAN ADVOKAT DARI 2 ORGANISASI ADVOKAT

Palangkaraya, 31 Juli 2024 | Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya mengambil sumpah/ janji Advokat sebanyak 19 orang yang berasal dari Perkumpulan Pengacara Muda Indonesia (Permadin) dan Perkumpulan Pengacara dan Penasehat Hukum Indonesia (P3HI).

PELANTIKAN HAKIM TINGGI

Palangka Raya, 1 Agustus 2024 | Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya mengambil sumpah jabatan dan melantik Bapak Maskur, S.H., dan Ibu Sari Sudarmi, S.H. sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya.



PELANTIKAN KPN KUALA KAPUAS

Palangka Raya, 30 Juli 2024 | Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya mengambil sumpah jabatan dan melantik Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

PELANTIKAN HAKIM TINGGI

Palangka Raya, 6 Agustus 2024 | Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya mengambil sumpah jabatan dan melantik ibu Suswanti, S.H., M.Hum sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya.





PELANTIKAN KPN PANGKALAN BUN

Palangka Raya, 7 Agustus 2024 | Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya mengambil sumpah jabatan dan melantik Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

ASESMEN PENILAIAN AMPUH

Palangka Raya, 15 Agustus 2024 | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melakukan Asesmen sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya.



PENGAMBILAN SUMPAH ANGGOTA DPRD PROVINSI KALTENG

Palangka Raya, 28 Agustus 2024 | Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya mengambil sumpah/janji anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2024-2029.

TURNAMEN TENIS PERORANGAN PIALA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI KE-IV TAHUN 2024

Yogyakarta, 14 - 16 September 2024 | Pengadilan Tinggi Palangkaraya beserta Pengadilan Negeri dibawahnya mengikuti Turnamen Tenis Perorangan Piala Ketua Mahkamah Agung RI ke-IV tahun 2024 atau PTWP 2024.





PELANTIKAN KPT PALANGKARAYA

Jakarta, 3 Oktober 2024 | Ketua Mahkamah Agung RI mengambil sumpah jabatan dan melantik Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Ibu Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H.

KPT MENJADI NARASUMBER KEGIATAN "THE FRENCH - INDONESIAN DAY OF LAW"

Jakarta, 7 Oktober 2024 | KPT Palangkaraya, Ibu Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H. menjadi narasumber dalam kegiatan "The French - Indonesian Day of Law" yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Kedutaan Besar Perancis.



KPT MENJADI NARASUMBER PADA BIMTEK PENANGANAN PERKARA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF

Ambon, 8 - 10 Oktober 2024 | Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Ibu Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H. menjadi narasumber pada Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif Ditjen Badilum MARI.

SILATURAHMI KE KEJAKSAAN TINGGI KALTENG

Palangka Raya, 18 Oktober 2024 | KPT Palangkaraya, Ibu Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H., melakukan kunjungan Silaturahmi dan Koordinasi ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah serta menjalin Kerjasama dalam rangka penegakan hukum di wilayah Kalimantan Tengah.





SILATURAHMI KE KOREM 102/PANJU PANJUNG

Palangka Raya, 21 Oktober 2024 | KPT Palangkaraya, Ibu Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H., melakukan kunjungan Silaturahmi ke Korem 102/Panju Panjung Kalimantan Tengah dan menjalin Kerjasama dalam rangka penegakan hukum di wilayah Kalimantan Tengah.

SILATURAHMI KE KANWIL KEMENKUMHAM KALTENG

Palangka Raya, 21 Oktober 2024 | KPT Palangkaraya, Ibu Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H., melakukan kunjungan Silaturahmi ke Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah dan menjalin Kerjasama dalam rangka penegakan hukum di wilayah Kalimantan Tengah.



SILATURAHMI KE UNIVERSITAS NEGERI PALANGKARAYA

Palangka Raya, 23 Oktober 2024 | KPT Palangkaraya, Ibu Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H., melakukan kunjungan Silaturahmi ke Universitas Negeri Palangkaraya dan menjalin Kerjasama dalam bidang penelitian kajian serta riset bidang studi.

KPT MENJADI NARASUMBER PADA BIMTEK PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Banten, 23 - 25 Oktober 2024 | Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Ibu Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H. menjadi narasumber pada Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.





SILATURAHMI KE POLDA KALTENG

Palangka Raya, 30 Oktober 2024 | KPT Palangkaraya, Ibu Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H., melakukan kunjungan Silaturahmi ke Polda Kalimantan Tengah dan menjalin Kerjasama dalam rangka penegakan hukum di wilayah Kalimantan Tengah.

SILATURAHMI KE PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA

Palangka Raya, 7 November 2024 | KPT Palangkaraya, Ibu Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H., melakukan kunjungan ke Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya dalam rangka Silaturahmi dan koordinasi mengenai IKAHI Daerah Kalimantan Tengah.



PELANTIKAN KPN PALANGKARAYA

Palangka Raya, 8 November 2024 | Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya mengambil sumpah jabatan dan melantik Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya.

PELANTIKAN HAKIM TINGGI

Palangka Raya, 18 November 2024 | Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya mengambil sumpah jabatan dan pelantikan ibu Sundari, S.H., M.H., sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya.





PELANTIKAN KPN NANGA BULIK

Palangka Raya, 21 November 2024 | Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya mengambil sumpah jabatan dan melantik Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik.

PELANTIKAN HAKIM TINGGI

Palangka Raya, 22 November 2024 | Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya mengambil sumpah jabatan dan melantik Ibu Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum., Bapak Anry Widyo Laksono, S.H., M.H., dan Ibu Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H. sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya.



PENGAMBILAN SUMPAH PIMPINAN DPRD PROV KALTENG

Palangka Raya, 26 November 2024 | Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya memandu pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2024-2029.

PELANTIKAN PANITERA PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

Palangka Raya, 29 November 2024 | Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya mengambil sumpah dan melantik Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya.





PENERIMAAN PENGHARGAAN ABHINAYA UPANGGA WISESA TAHUN 2024

Solo, 5 Desember 2024 | Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya menerima penghargaan dalam acara Abhinaya Upangga Wisesa 2024 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI. Pada acara tersebut Pengadilan Tinggi Palangkaraya menerima 3 penghargaan yaitu Peringkat Terbaik II kategori Pengadilan Tinggi dalam Lomba PTSP, Terbaik III Capaian Nilai Tertinggi Pada EIS Kategori Pengadilan Tinggi Perkara 1-300 dan Predikat Unggul dalam penilaian AMPUH.

Beberapa Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya juga turut menerima penghargaan dalam acara Abhinaya Upangga Wisesa 2024.



PENYERAHAN PIALA BERGILIR ANUGERAH NYALA KARYA TAHUN 2024

Palangka Raya, 2 Januari 2025 | Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya menyerahkan piala bergilir Anugerah Nyala Karya kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangkalan Bun atas capaian kinerja terbaik tahun 2024.



ANUGRAH/ PENGHARGAAN PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA 2024



PERINGKAT II PENILAIAN LAYANAN PENGADILAN ATAU PTSP KATEGORI PENGADILAN TINGGI TAHUN 2024

Pada tanggal 5 Desember 2024, Pengadilan Tinggi Palangkaraya menerima penghargaan lomba layanan Pengadilan atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai Peringkat II Kategori Pengadilan Tinggi dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

PERINGKAT III CAPAIAN NILAI TERTINGGI PADA EIS TAHUN 2024 UNTUK KATEGORI PENGADILAN TINGGI PERKARA 1 S/D 300

Pada tanggal 5 Desember 2024, Pengadilan Tinggi Palangkaraya menerima penghargaan Capaian Nilai Tertinggi pada Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) Tahun 2024 sebagai Peringkat II untuk kategori Pengadilan Tinggi dengan Perkara 1 s/d 300 dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.



PREDIKAT UNGGUL DALAM SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH

Pada tanggal 5 Desember 2024, Pengadilan Tinggi Palangkaraya menerima Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh dengan Predikat UNGGUL dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

PERINGKAT II KATEGORI UAPPA-W BESAR ATAS KINERJA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UAPPA-W TAHUN 2024

Pada tanggal 25 Juni 2024, Pengadilan Tinggi Palangkaraya menerima penghargaan sebagai Peringkat 2 Kategori Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah (UAPPA-W) Besar atas Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan UAPPA-W Tahun 2023 dari Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah.





PENYAJIAN DATA

Dalam *Summary Executive* Laporan Tahunan Pertanggungjawaban Kegiatan Tahun 2024 ini data yang ditampilkan merupakan data dari bulan Januari sampai dengan Desember 2024. Adapun data yang disajikan meliputi :

1. Keadaan Perkara, Penyelesaian Perkara dan Capaian Prioritas Nasional.
2. Sumber Daya Manusia
3. Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana dan Teknologi Informasi.
4. Peningkatan Pelayanan Publik
5. Pengawasan
6. Penutup





**1. KEADAAN PERKARA,
PENYELESAIAN PERKARA DAN
CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL**



KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA DAN CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

KEADAAN PERKARA PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

PERSENTASE PENANGANAN PERKARA PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

Keadaan Perkara Pidana Biasa, Pidana Anak, Pidana Khusus Tipikor dan Perdata Tahun 2024 pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya

Jumlah Perkara	384
Putus	378
Sisa	6
Persentase Penyelesaian	98,44 %

Keadaan Perkara yang diajukan Upaya Kasasi Tahun 2024

Pidana Biasa	185
Pidana Anak	2
Tipikor	15
Perdata Gugatan	62
PHI	6

Keadaan Perkara yang diajukan Upaya Banding Tahun 2024

Pidana Biasa	260
Pidana Anak	7
Tipikor	16
Perdata Gugatan	90

Keadaan Perkara yang diajukan Upaya Peninjauan Kembali Tahun 2024

Pidana Biasa	15
Pidana Anak	0
Tipikor	9
Perdata Gugatan	19

KEADAAN PERKARA PENGADILAN NEGERI SE-WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

PERKARA PIDANA

KEADAAN PERKARA	JUMLAH PERKARA	PUTUS	SISA	PERSENTASE
Perkara Pidana Biasa dan Pidana Khusus	2.663	2.381	278	89,41 %
Pidana Singkat	0	0	0	100,00 %
Pidana Cepat	86	86	0	100,00 %
Perkara Lalu Lintas	12.725	12.725	0	100,00 %
Perkara Pra Peradilan	28	28	0	100,00 %
Perkara Pidana Anak	83	79	4	95,18 %
Perkara Pidana Korupsi	71	47	24	66,19 %

PERKARA PERDATA

KEADAAN PERKARA	JUMLAH PERKARA	PUTUS	SISA	PERSENTASE
Perkara Perdata Gugatan	848	643	205	75,83 %
Perkara Perdata Permohonan	659	648	11	98,33 %
Perkara Perdata Gugatan Sederhana	163	159	4	97,55 %
Perlawanan / Bantahan	14	10	4	71,42 %
Perkara Pengadilan Hubungan Industrial	24	23	1	95,83 %

PENYELESAIAN PERKARA

- Jumlah seluruh sisa perkara yang belum diputus di tahun 2024 pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah adalah 537 perkara.
- Jumlah seluruh perkara yang diputus tepat waktu pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah adalah 4.482 perkara.
- Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali tahun 2024 adalah 2.772 perkara.
- Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Mediasi tahun 2024 adalah 17 perkara.
- Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil diselesaikan melalui Diversi tahun 2024 adalah 1 perkara.
- Jumlah Perkara yang berhasil diselesaikan melalui *Restorative Justice* Tahun 2024, adalah 38 perkara.

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Pos Bantuan Hukum

Seluruh Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran pelaksanaan Posbakum (Pos Bantuan Hukum) dengan total anggaran sebesar Rp 340.000.000,00 untuk 11 Pengadilan Negeri dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 339.996.000 atau terealisasi sebesar 99,9 %.

Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Untuk tahun 2024, yang mendapat alokasi anggaran untuk pelaksanaan Sidang Keliling adalah Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan Negeri Muara Teweh, Pengadilan Negeri Kuala Kurun dan Pengadilan Negeri Pulang Pisau dengan total pagu anggaran sebesar Rp 282.683.000 dan realisasi Anggaran Rp 281.953.115 atau terealisasi 99,74%.

Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Dalam memenuhi pelayanan publik dengan memberikan hak atas biaya perkara cuma-cuma (prodeo) yang didasari PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dinyatakan bahwa proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA pengadilan, bagi masyarakat yang tidak mampu (miskin) secara ekonomis.

Pada tahun anggaran 2024 yang menerima alokasi anggaran adalah Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan Pengadilan Negeri Pulang Pisau dengan Pagu anggaran masing-masing Rp1.340.000.



2. SUMBER DAYA MANUSIA

2

SUMBER DAYA MANUSIA

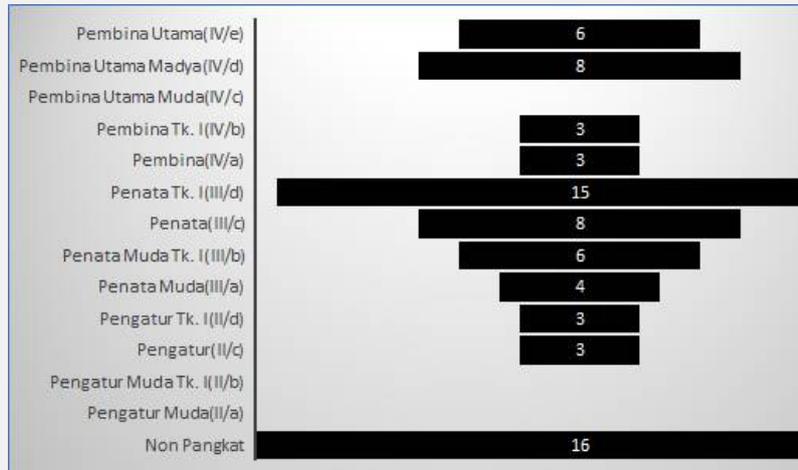
Pegawai di Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah dapat dibedakan atas pegawai teknis dan non teknis yang saling bersinergi untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi peradilan. Jumlah sumber daya manusia yang ada pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya tahun 2024 terdiri dari 346 orang Hakim dan Pegawai serta ditambah dengan 108 orang tenaga PPNPN.

KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA DI PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

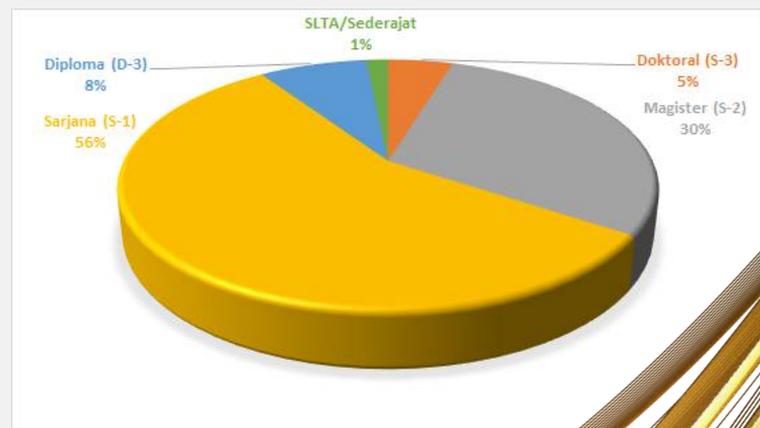
KOMPOSISI SDM JUMLAH

Ketua	1
Wakil Ketua	1
Hakim Tinggi	12
Hakim Adhoc	3
Hakim Non Palu	1
Pejabat Struktural	12
Pejabat Fungsional	12
Pelaksana (ASN)	20
Fungsional (PPPK)	2
PPNPN	10
Tenaga Lepas	1
JUMLAH	75

Komposisi Berdasarkan Kepangkatan



Komposisi Berdasarkan Pendidikan



MUTASI, PROMOSI, PENSIUNAN, PEMBERHENTIAN, PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN HUKUMAN DISIPLIN

MUTASI

Mutasi yang terjadi pada pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya selama tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

- Mutasi Masuk : 41 Orang
- Mutasi Keluar : 43 Orang

Mutasi masuk terdiri dari 21 orang Hakim, 19 tenaga Kepaniteraan, 1 Tenaga Kesekretariatan.

Mutasi keluar terdiri dari 23 orang Hakim dan Calon Hakim, 18 tenaga Kepaniteraan, 2 Tenaga Kesekretariatan

PROMOSI

Selama tahun 2024, jumlah Sumber Daya Manusia yang dipromosikan pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya sebanyak 34 orang.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Selama tahun 2024, jumlah Sumber Daya Manusia teknis dan non teknis yang mengikuti Diklat sebanyak 169 orang.

PENSIUNAN DAN PEMBERHENTIAN

Selama tahun 2024, jumlah Sumber Daya Manusia yang Pensiun ada 3 orang, Meninggal Dunia 1 orang dan 1 orang Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri

HUKUMAN DISIPLIN

Jumlah Sumber Daya Manusia yang diberikan hukuman disiplin selama tahun 2024 pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya sebanyak 3 orang dan diberikan hukuman disiplin tingkat Berat.



3. PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI



PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pada Tahun Anggaran 2024 Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah memperoleh anggaran sebesar Rp82.707.969.000 yang terdiri dari DIPA 01 BUA (Badan Urusan Administrasi) sebesar Rp80.650.141.000 dan DIPA 03 BADILUM (Badan Peradilan Umum) sebesar Rp. 2.057.828.000.

Jika dilihat dari pagu anggaran DIPA 01 selama tahun 2024, maka anggaran paling besar ada pada Belanja Pegawai yaitu sebesar Rp54.707.564.000 atau sekitar 67,83% dari jumlah pagu anggaran yang ada, kemudian disusul oleh Belanja Barang sebesar Rp20.965.712.000 atau 26% dari total pagu anggaran, dan Belanja Modal dengan nilai pagu Rp4.976.865.000 atau 6,17%.

REALISASI ANGGARAN DIPA BUA TAHUN 2024

No	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
1	PT Palangkaraya	19,544,238,000	18,385,312,769	1,158,925,231	94.07
2	PN Palangkaraya	12,749,276,000	12,472,717,028	276,558,972	97.83
3	PN Sampit	4,600,959,000	4,586,825,454	14,133,546	99.69
4	PN Pangkalan Bun	5,328,182,000	5,322,977,955	5,204,045	99.90
5	PN Kuala Kapuas	5,977,105,000	5,971,756,702	5,348,298	99.91
6	PN Muara Teweh	4,097,430,000	4,082,131,794	15,298,206	99.63
7	PN Buntok	4,620,592,000	4,477,596,553	142,995,447	96.91
8	PN Tamiang Layang	4,676,577,000	4,672,793,219	3,783,781	99.92
9	PN Kasongan	4,012,776,000	3,981,720,042	31,055,958	99.23
10	PN Kuala Kurun	3,847,285,000	3,411,424,327	435,860,673	88.67
11	PN Nanga Bulik	7,110,254,000	7,089,018,639	21,235,361	99.70
12	PN Pulang Pisau	4,085,467,000	4,072,199,845	13,267,155	99.68
Jumlah		80.650.141.000	78.526.474.327	2.123.666.673	97,37

REALISASI ANGGARAN DIPA BADILUM TAHUN 2024

No	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
1	PT Palangkaraya	285.700.000	274.028.230	11.671.770	95,91%
2	PN Palangkaraya	245.450.000	229.473.150	15.976.850	93,49%
3	PN Sampit	255.500.000	254.908.500	591.500	99,77%
4	PN Pangkalan Bun	205.000.000	204.938.000	62.000	99,97%
5	PN Kuala Kapuas	203.500.000	198.800.000	4.700.000	97,69%
6	PN Muara Teweh	172.510.000	170.161.125	2.348.875	98,64%
7	PN Buntok	109.500.000	100.602.432	8.897.568	91,87%
8	PN Tamiang Layang	84.840.000	84.271.000	569.000	99,33%
9	PN Kasongan	109.500.000	109.207.996	292.004	99,73%
10	PN Kuala Kurun	88.922.000	86.519.500	2.402.500	97,30%
11	PN Nanga Bulik	103.815.000	102.975.623	839.377	99,19%
12	PN Pulang Pisau	193.591.000	192.531.715	1.059.285	99,45%
Jumlah		2.057.828.000	2.008.417.271	49.410.729	97,60%

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri se-Kalimantan tengah merupakan salah satu penyumbang kas negara sebagai sumber penerimaan dalam pembiayaan belanja pemerintah. Pengelolaan PNBP dilaksanakan secara akurat, transparan dan akuntabel.

Pada tahun 2024 realisasi PNBP pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri se-Kalimantan tengah sebesar Rp647.894.593.

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Tahun 2024 bagian Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah telah melaksanakan tugas untuk menyiapkan dan memelihara sarana dan prasarana dalam rangka mendukung proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Sarana dan Prasarana tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- Gedung Kantor di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya berjumlah 14 unit;
- Rumah Dinas yang ada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya berjumlah 59 unit;
- Tempat Ibadah yang ada di lokasi kantor di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya berjumlah 7 unit;
- Kendaraan dinas roda 4 yang ada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya berjumlah 52 unit, sedangkan roda 2 berjumlah 51 unit.

PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam rangka mewujudkan Badan Peradilan yang Agung dan *Modern* serta mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel, Pengadilan Tinggi Palangkaraya menempatkan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) sebagai salah satu prioritas perubahan, yang diharapkan dapat memiliki manajemen informasi yang menjamin keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta organisasi modern berbasis TI terpadu. Berikut uraian mengenai Implementasi Pengelolaan TI yang ada di Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri dibawahnya.

Server dan Jaringan Internet

Jumlah Server yang berada di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya berjumlah 26 Server dengan Kondisi Baik. *Bandwith* Internet bervariasi dari 50 MBPS hingga 150 MBPS dengan Perangkat *Access Point* berjumlah 150.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

SIPP adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim di daerah. Secara umum pengimplementasian SIPP Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah pada tahun 2024 sudah berjalan dengan baik, dari 12 (dua belas) Pengadilan yang ada sudah menggunakan versi Lokal 5.6.4 dan SIPP Web versi 5.2.0.

PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Website Pengadilan

Dalam era digitalisasi sekarang ini *website* mempunyai peran yang sangat penting, karena dengan adanya *website* akan tercipta transparansi segala kegiatan yang ada di badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, khususnya Peradilan Umum. Melalui *website*, keterbukaan informasi publik maupun keterbukaan pelayanan publik akan mudah diakses oleh masyarakat pengguna pengadilan.

Implementasi Sertifikat Elektronik

Selama tahun 2024, Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah yang sudah memiliki sertifikat elektronik (TTE) sebanyak 84 orang.

Implementasi E-COURT (The Electronic Justice System)

Penerapan Layanan *e-Court* sudah aktif dan terimplementasi dengan baik pada 11 (sebelas) Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Selama tahun 2024, Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah mengimplementasi *E-Court*.

E-BERPADU (Elektronik Berkas Pidana Tepadu)

Aplikasi E-Berpadu hadir untuk mewujudkan *digitalisasi* Administrasi Perkara Pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Implementasi E-Berpadu selama tahun 2024 di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

JENIS PERKARA	JUMLAH PERKARA
Perkara Gugatan	1.733
Perkara Gugatan Sederhana	246
Perkara Bantahan	18
Permohonan	1.057
Perkara Banding <i>E-Court</i>	87

JENIS LAYANAN	JUMLAH LAYANAN
Pelimpahan Berkas	2.540
Penggeledahan	1.109
Penyitaan	4.212
Perpanjangan Penahanan	1.259
Izin Besuk Tahanan	635
Izin Pinjam Pakai Barang Bukti	41
Diversi	17
Pembantaran	2



4. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK



PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Program Akreditasi Penjaminan Mutu telah dilaksanakan di lingkungan peradilan umum sejak tahun 2014. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI menilai perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja pengadilan, yang semula dikenal dengan APM (Akreditasi Penjaminan Mutu) sehingga pada tahun 2023 diluncurkanlah program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023 Tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (Ampuh) Di Lingkungan Peradilan Umum.

Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah menyelenggarakan proses Asesmen AMPUH internal pada tanggal 12 Agustus 2024 sebelum dilaksanakannya asesmen oleh tim penilai dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, sedangkan asesmen terhadap Pengadilan Negeri se- Kalimantan Tengah telah dilakukan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang telah tersertifikasi sebagai asesor AMPUH.

Atas hasil asesmen yang dilakukan oleh tim Asesor Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan tim Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang dilaksanakan pada 20 November 2024 secara daring berdasarkan Salinan Putusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1159/DJU/SK/OT.01.3/XII/2024 Tentang Nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri se- Kalimantan Tengah yang meraih predikat **Unggul** adalah Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri Buntok, sedangkan Pengadilan Negeri lain memperoleh predikat **Utama**.

PELAYANAN TERPADUSATU PINTU (PTSP)

Sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah telah melaksanakan Sistem Satu Pintu yang dikenal dengan istilah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau *One Gate Service*.

Pada Tahun 2024, Pengadilan Tinggi Palangkaraya kembali meraih Peringkat II kategori pengadilan tinggi untuk ke 5 (lima) kalinya dalam Lomba Layanan Pengadilan/ PTSP dan Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB sebagai Juara Harapan II (dua) kategori Pengadilan Negeri Kelas IB Lomba PTSP yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna pengadilan, sekaligus untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan seluruh Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah terus membangun inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi tersebut dibangun dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan *juncto* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan telah membuat inovasi untuk pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang di terapkan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding antara lain E-Berpadu, Siwas, JDIH, Perkusi dan Lentera yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya sendiri terdapat sebanyak 12 inovasi antara lain Huma Betang, Sipres, Sidat dan Sagita serta Pengadilan Negeri se- Kalimantan Tengah sebanyak 79 inovasi.



5. PENGAWASAN





PENGAWASAN

PENGAWASAN MELEKAT

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016, tanggal 25 Juli 2016 tentang pengawasan dan pembinaan atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan peradilan dibawahnya, mengatur tentang pengawasan oleh atasan langsung, sehingga Pengadilan Tinggi Palangkaraya selaku kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung telah melaksanakan pengawasan melekat berupa serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian yang dilaksanakan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara terus menerus agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan efektif dan efisien sesuai rencana dan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku;

PENGAWASAN BIDANG DAN DAERAH

Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam melaksanakan pengawasan bidang telah menunjuk Hakim Tinggi Pengawas Bidang sesuai SK sebagai berikut:

Nomor : 51/KPT.W16-U/SK.PW1.1/III/2024

Tanggal : 01 Maret 2024

Nomor : 107/KPT.W16-U/SK.PW1.1/VIII/2024

Tanggal : 06 Agustus 2024

Nomor : 158/KPT.W16-U/SK.PW1.1/XI/2024

Tanggal : 22 Nopember 2024

Pada Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah melaksanakan pengawasan daerah sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dan pembinaan sebanyak 13 (tiga belas) kali secara langsung maupun secara daring sesuai SK penunjukkan Hakim Tinggi Pengawas Daerah Sebagai berikut:

Nomor : 50/KPT.W16-U/SK.PW1.1/III/2024

Tanggal : 01 Maret 2024

Nomor : 112/KPT.W16-U/SK.PW1.1/VIII/2024

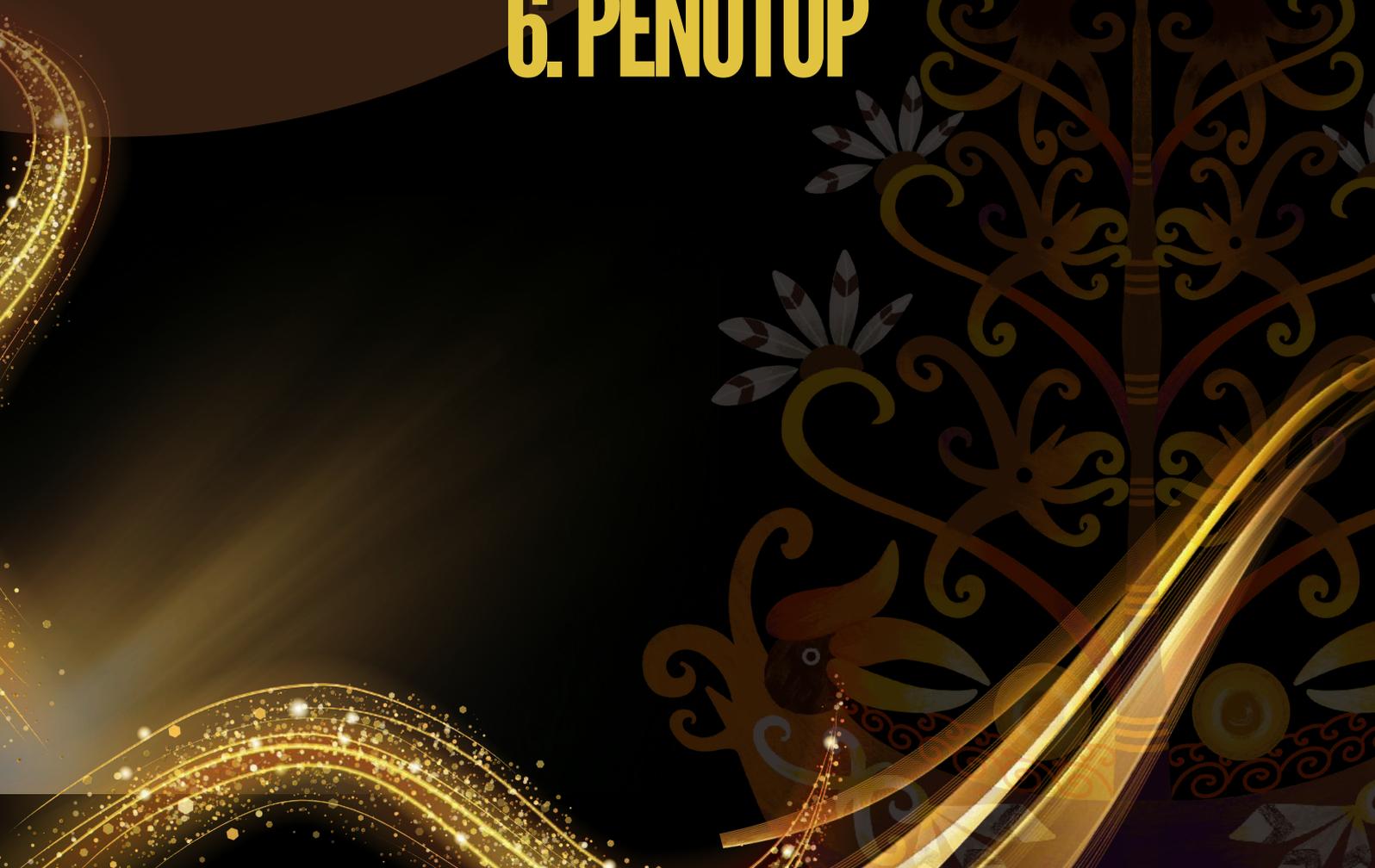
Tanggal : 06 Agustus 2024

Nomor : 159/KPT.W16-U/SK.PW1.1/XI/2024

Tanggal : 22 Nopember 2024



6. PENUTUP





PENUTUP

Summary Executive Laporan Tahunan Pertanggungjawaban Kegiatan tahun 2024 ini berisi capaian dan prestasi Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang merupakan cerminan transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri se- Kalimantan Tengah kepada publik, dalam menyelenggarakan organisasi kekuasaan kehakiman di Provinsi Kalimantan Tengah.

Dorongan serta semangat yang telah diberikan oleh semua pihak menjadi faktor penentu atas seluruh keberhasilan dan capaian yang diraih oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah selama tahun 2024.

Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga peradilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang telah bekerja keras dalam mewujudkan berbagai prestasi pada tahun 2024. Tidak lupa kami ucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak atas kerja sama dan sinergi yang telah terjalin selama ini.

Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah berkomitmen untuk terus meningkatkan prestasi dalam upaya mewujudkan Peradilan yang Agung dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Akhir kata, tak ada gading yang tak retak. Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah menyadari bahwa untuk menjadi yang terbaik memerlukan proses. Untuk itu Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah siap menempa diri.

” *Padi ditumbuk menjadi beras
Dimasak diatas api yang menyala
Mari bersama tingkatkan integritas
Demi terwujudnya Visi dan Misi kita*

“